

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DESENTRALISASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**Adinda Humaira¹, Muhammad Arifai², Ali Imran³**^{1,2,3}Politeknik Negeri LhokseumaweEmail: dindahumai22@gmail.com¹, arifai_m@pnl.ac.id², ali.imr4n@gmail.com³**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan target anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kinerja pemerintah daerah merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 112 responden dari perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kejelasan target anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara simultan, kejelasan target anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,545 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen menjelaskan 54,5% variasi kinerja pemerintah daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkup penelitian ini.

Kata Kunci: Kejelasan Target Anggaran, Desentralisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to determine the influence of budget target clarity, decentralization, and internal control systems on the performance of the Lhokseumawe City Government. Local government performance serves as a key indicator for assessing the success of governance, particularly in achieving effective, efficient, and accountable administration. This study employs a quantitative method with an associative approach. Data were collected via questionnaires distributed to 112 respondents from Lhokseumawe City regional government agencies (OPD). Data analysis was conducted using multiple linear regression with the aid of SPSS software. The results indicate that, individually, budget target clarity has a positive and significant effect on local government performance. Decentralization does not have a significant effect on local government performance. The internal control system has a positive and significant effect on local government performance. Simultaneously, budget target clarity, decentralization, and the internal control system significantly influence the performance of the Lhokseumawe City Government. An Adjusted R-Square value of 0.545 indicates that the independent

variables explain 54.5% of the variation in local government performance, while the remainder is influenced by factors outside the scope of this study.

Keywords: *Budget Target Clarity, Decentralization, Internal Control System, Local Government Performance.*

A. PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kinerja tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, melaksanakan kebijakan publik, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Menurut Shelly dan Fauzan (2023), kinerja pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas hasil kegiatan dan program yang telah dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja pemerintah berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan serta memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Salah satu indikator yang menunjukkan pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dilihat melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan predikat SAKIP dari kategori CC menjadi B pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh nilai 60,18 dengan predikat B, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat aspek yang perlu diperkuat agar pengelolaan kinerja lebih berorientasi pada hasil.

Peningkatan kinerja pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan. Salah satu faktor yang berperan adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran

diperlukan agar setiap program dan kegiatan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran anggaran yang jelas akan membantu organisasi dalam mengarahkan sumber daya secara efektif sehingga pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

Selain kejelasan sasaran anggaran, faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaan desentralisasi juga memiliki tantangan dalam aspek pengawasan dan pertanggungjawaban.

Faktor lainnya adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengelola risiko, mencegah kesalahan maupun penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Menurut Afifah dkk. (2023), sistem pengendalian internal merupakan kerangka kerja organisasi untuk mencapai tujuan operasional, menjaga akuntabilitas, dan mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan fenomena tersebut serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari keberhasilan penggunaan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2018), kinerja sektor publik merupakan hasil kerja organisasi publik yang dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan, program, maupun kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah menjadi penting karena dapat

digunakan sebagai dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan tingkat kejelasan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sasaran anggaran yang jelas akan memberikan arah bagi organisasi dalam menentukan prioritas kegiatan serta menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ahmad dan Osmad (2019), pemerintah perlu menetapkan tujuan anggaran yang spesifik dan mudah dipahami oleh para pelaksana agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah serta dapat dipertanggungjawabkan keberhasilannya. Kejelasan sasaran anggaran membantu aparatur dalam memahami target yang harus dicapai sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhamad (2023) serta Afifah dan Suhairi (2024) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan, maka semakin baik pula pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumaw

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan, mengelola sumber daya, serta menetapkan prioritas pembangunan daerah. Penerapan desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Namun, pelaksanaan desentralisasi juga membutuhkan kemampuan aparatur dan sistem pengawasan yang baik agar kewenangan yang diberikan dapat digunakan secara optimal.

Penelitian Deshy dan Nur (2025) menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Namun penelitian Miar dkk. (2024) menemukan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilakukan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan, efektivitas kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam organisasi pemerintahan, sistem pengendalian intern berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian yang baik dapat membantu pemerintah daerah mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pencapaian kinerja.

Menurut Afifah dkk. (2023), sistem pengendalian internal merupakan kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan operasional, menjaga akuntabilitas, dan mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian Welly (2021) menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian Siti dan Muhammad (2023) menemukan hasil berbeda bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk

menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan teknik statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sampel penelitian terdiri dari 112 responden yang berasal dari OPD Kota Lhokseumawe. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi responden terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, sistem pengendalian intern, dan kinerja pemerintah daerah.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran

X₂ = Desentralisasi

X₃ = Sistem Pengendalian Intern

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Error.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemerintah Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini terletak di pesisir timur Provinsi Aceh dan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi

serta pemerintahan di wilayah Aceh Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Lhokseumawe terus melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan objek penelitian Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.

Karakteristik Responden

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 116 kuesioner, dengan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 112 kuesioner. Responden dalam penelitian ini merupakan aparatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tabel 4.1. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Penyebaran Kuesioner	116	100%
Kuesioner Kembali	112	96,55%
Kuesioner Tidak Kembali	4	3,45%
Kuesioner Dapat Diolah	112	96,55%

Sumber Data Olah : 2026

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dari 116 kuesioner yang disebarakan, terdapat 112 kuesioner yang kembali dan dapat digunakan dalam penelitian. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 96,55% menunjukkan bahwa responden memberikan respons yang baik terhadap penelitian yang dilakukan.

Selanjutnya karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik lainnya.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Penelitian

	Kategori	Jumlah	Persentase
Usia	< 30 tahun	9	8,0%
	30 - 40 tahun	47	42,0%
	> 40 tahun	56	50,0%
Jenis Kelamin	Laki-laki	52	46,4%

	Perempuan	60	53,6%
Pendidikan Terakhir	SMA	3	2,7%
	D3	8	7,1%
	S1	62	55,4%
	S2	39	34,8%
Masa Kerja	< 5 Tahun	16	14,3%
	5 - 10 Tahun	23	20,5%
	> 10 Tahun	73	65,2%

Sumber Data Olah : 2026

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kebanyakan responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 52 responden (46,4%) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 60 responden (53,6%). Sedangkan jika responden dilihat berdasarkan karakteristik usia diketahui bahwa mayoritas responden berusia < 30 tahun 9 sebanyak 33 responden (46%) dan minoritas responden berusia 18-25 tahun sebanyak 33 responden (6%). Diketahui pula bahwa jumlah responden berdasarkan jenjang pendidikan terbanyak adalah responden yang menempuh pendidikan dengan kategori Sarjana (S1) sebanyak 42 responden atau 59%, Diploma sebanyak 16 responden atau 22%, Magister (S2) sebanyak 8 responden atau 11%, dan kategori Sekolah Menengah Atas (SLTA) sebanyak 6 responden atau 8%. Sedangkan jumlah responden berdasarkan lama masa kerja lebih banyak pada kategori 11-20 tahun sebanyak 40 responden atau 56%, lama masa kerja pada kategori 1-10 tahun sebanyak 19 responden atau 26%, lama masa kerja pada kategori 21-30 tahun sebanyak 12 responden atau 17%, dan lama masa kerja pada kategori >30 tahun sebanyak 1 responden atau 1%.

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk menilai keabsahan suatu survei. Suatu survei dikatakan substansial jika pertanyaan-pertanyaan pada survei tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh survei tersebut. Berikut ini adalah hasil uji validitas dari faktor-faktor penelitian:

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Validitas (r_{hitung})	r_{tabel}	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	X1.P1	0,689	0,186	Valid
	X1.P2	0,759	0,186	Valid
	X1.P3	0,794	0,186	Valid

	X1.P4	0,774	0,186	Valid
	X1.P5	0,729	0,186	Valid
	X1.P6	0,622	0,186	Valid
	X1.P7	0,630	0,186	Valid
	X1.P8	0,760	0,186	Valid
	X1.P9	0,777	0,186	Valid
	X1.P10	0,728	0,186	Valid
	X1.P11	0,821	0,186	Valid
Desentralisasi (X2)	X2.P1	0,933	0,186	Valid
	X2.P2	0,963	0,186	Valid
	X2.P3	0,951	0,186	Valid
	X2.P4	0,933	0,186	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X3)	X3.P1	0,667	0,186	Valid
	X3.P2	0,646	0,186	Valid
	X3.P3	0,721	0,186	Valid
	X3.P4	0,770	0,186	Valid
	X3.P5	0,794	0,186	Valid
	X3.P6	0,637	0,186	Valid
	X3.P7	0,763	0,186	Valid
	X3.P8	0,751	0,186	Valid
	X3.P9	0,769	0,186	Valid
	X3.P10	0,816	0,186	Valid
	X3.P11	0,727	0,186	Valid
	X3.P12	0,755	0,186	Valid
	X3.P13	0,705	0,186	Valid
	X3.P14	0,675	0,186	Valid
	X3.P15	0,540	0,186	Valid
	X3.P16	0,571	0,186	Valid
	X3.P17	0,668	0,186	Valid
	X3.P18	0,677	0,186	Valid
	X3.P19	0,662	0,186	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Y.P1	0,595	0,186	Valid
	Y.P2	0,634	0,186	Valid
	Y.P3	0,603	0,186	Valid
	Y.P4	0,684	0,186	Valid
	Y.P5	0,602	0,186	Valid
	Y.P6	0,745	0,186	Valid
	Y.P7	0,699	0,186	Valid
	Y.P8	0,702	0,186	Valid
	Y.P9	0,749	0,186	Valid
	Y.P10	0,752	0,186	Valid
	Y.P11	0,790	0,186	Valid

	Y.P12	0,760	0,186	Valid
	Y.P13	0,755	0,186	Valid

Sumber : Data Diolah 2026

Berdasarkan tabel 8 diatas, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa untuk variabel kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, sistem pengendalian intern dan kinerja pemerintah daerah, tidak terdapat pernyataan yang tidak valid. Semua variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel, sehingga semua item pernyataan yang digunakan dalam variabel ini dianggap layak atau valid.

Selanjutnya adalah hasil uji reabilitas, Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat diandalkan atau dapat dipercaya dalam mengukur suatu objek yang akan diukur. Dengan melakukan pengujian ini dapat menunjukkan konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas

NO	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,913	Reliabel
2	Desentralisasi	0,960	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern	0,941	Reliabel
4	Kinerja Pemerintah Daerah	0,904	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki nilai *cronbach Alpha* 0,60 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap indikator dari variabel tersebut dapat dianggap reliabel.

Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov* dalam penelitian ini adalah seperti pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		112
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3.57551497
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.081
	<i>Positive</i>	.059
	<i>Negative</i>	-.081
<i>Test Statistic</i>		.081

Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.071
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.073
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.066
		Upper Bound	.080

Sumber: Data Diolah, 2026

Uji *one sample kolmogorov smirnov* pada Tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai Asymp, Sig yang diperoleh adalah sebesar 0,071 atau lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,071 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Heterokedastisitas

Adapun hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser adalah seperti pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.868	2.578		1.888	.062
	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.017	.063	.033	.267	.790
	Desentralisasi	-.042	.057	-.081	-.744	.458
	Sistem_Pengendalian_Intern	-.030	.039	-.104	-.765	.446

Sumber: Data Diolah, 2026

Uji Multikolinearitas

Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah seperti pada Tabel 4.7

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	13.724	3.878		3.539	.001		
	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.214	.094	.188	2.266	.025	.597	1.675
	Desentralisasi	.074	.085	.063	.867	.388	.768	1.302
	Sistem_Pengendalian_Intern	.376	.059	.582	6.374	.000	.492	2.033
a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah_Daerah								

a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah_Daerah

Sumber: Data diolah, 2026

Dapat diketahui bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki nilai tolerance sebesar 0,597 dan nilai VIF sebesar 1,675, variabel Desentralisasi memiliki nilai tolerance sebesar 0,768 dan nilai VIF sebesar 1,302, serta variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki nilai tolerance sebesar 0,492 dan nilai VIF sebesar 2,033. Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji T (Parsial)

Adapun hasil uji regresi parsial dalam penelitian ini adalah seperti pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.724	3.878		3.539	.001
	Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.214	.094	.188	2.266	.025
	Desentralisasi	.074	.085	.063	.867	.388
	Sistem_Pengendalian_Intern	.376	.059	.582	6.374	.000
a. Dependent Variable: Kinerja_Pemerintah_Daerah						

Sumber: Data Diolah, 2026

Hasil uji t menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai sig. $0,025 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Desentralisasi (X2) tidak berpengaruh signifikan dengan nilai sig. $0,388 > 0,05$, sehingga H2 ditolak. Sistem Pengendalian Intern (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, sehingga H3 diterima. Variabel yang paling dominan memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah adalah Sistem Pengendalian Intern dengan nilai beta sebesar 0,582.

Uji Regresi Simultan (Uji F)

Adapun hasil uji regresi simultan dalam penelitian ini adalah seperti pada Tabel 4.9

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1786.049	3	595.350	45.310	.000 ^b
	Residual	1419.058	108	13.139		
	Total	3205.107	111			

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada Tabel 4.9, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar $45,310 > F_{tabel} 2,689$. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga H4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah seperti pada Tabel

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746^a	.557	.545	3.625

Sumber: Data Diolah. 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.10 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,545. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern mampu menjelaskan variasi Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 54,5%, sedangkan 45,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai R sebesar 0,746 menunjukkan hubungan antarvariabel berada pada kategori kuat.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran anggaran yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil mampu memberikan arah bagi OPD dalam melaksanakan program serta mengevaluasi pencapaian kinerja. Kejelasan sasaran anggaran membantu meningkatkan efektivitas perencanaan, pengalokasian anggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Afifah dan Suhairi (2024) serta Kristanto (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.

Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan bahwa

pemberian kewenangan yang lebih luas belum secara langsung meningkatkan kinerja apabila tidak didukung oleh kemampuan aparatur, pengelolaan organisasi, dan optimalisasi kewenangan. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan anggaran serta masih adanya penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat dapat menjadi faktor yang menyebabkan pengaruh desentralisasi belum terlihat secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Miar dkk. (2024) dan Ahmad Mudhani (2018) yang menemukan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern yang baik mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern membantu mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan pengawasan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adrian dkk. (2023) dan Afifah dkk. (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berperan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan, maka semakin baik pula pencapaian kinerja pemerintah daerah. Kedua, Desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan belum secara langsung meningkatkan kinerja tanpa didukung oleh kemampuan pengelolaan organisasi dan sumber daya yang memadai. Ketiga, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern yang baik mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keempat, secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja melalui penguatan perencanaan anggaran, optimalisasi pelaksanaan kewenangan, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi sektor publik terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan jumlah responden yang terbatas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, menambah variabel lain yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah, serta menggunakan sumber data tambahan agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Radiansyah, Rizki Auliddiah & Suhardi. 2023. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kualitas Laporan Keuangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Biro Umum Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(2)11
- Afifah Chaerunnissa & Suhairi. 2024. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Kualitas SDM terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.” *Journal of Economic, Business and Accounting* 7(5):1481–1490
- Afifah Muannis Hanifah, Cris Kuntadi & Rachmat Pramukty. 2023. “Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen terhadap Good Corporate Governance.” *Jurnal Economina* 6:1318–1330.
- Ahmad Rudi Yulianto & Osmad Muthaher. 2019. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati.” *Tirtayasa Ekonomika* 14(2):204–219
- Awwaliyah Nur Azizah awwazizah & Dini Widyawati. 2020. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(2):1–20.
- Eka Jas Oktavia Sari. 2023. “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah.” *JOM FEKON* 3(1):380–393.
- Frenslly Loppies, Jefry Gasperz & Franco Benony Limba. 2023. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Sistem

- Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Manajemen* 1(1):1–9.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nur Atika Aini. 2015. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.” *Jom FEKON* 2(2):1–14.
- Rira Nuradhawati. 2019. “Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia.” *Jurnal Academia Praja* 2(1):152–170.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Welly. 2021. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18:133–145.